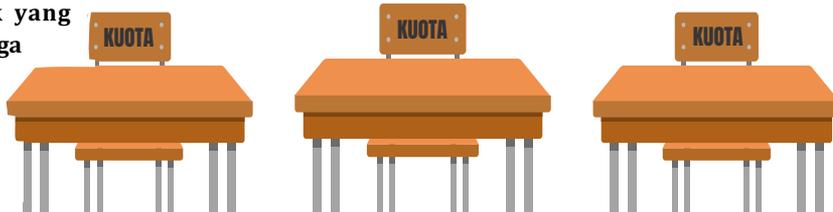


Tahun ajaran baru bagaikan 'medan perang' bagi calon siswa dan wali murid yang sedang mencari sekolah. Menyiapkan fisik untuk antrai panjang, memiliki kuota agar lancar saat harus daftar online hingga kesabaran wajib dijaga ketika server pendaftaran error. Bahkan, meski mulai tahun 2025 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengubah namanya menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kisruh yang sama berulang kembali. Diketahui, sebelumnya nama yang dipakai adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Wali murid di Provinsi Jawa Barat (Jabar) misalnya, mengeluhkan gangguan server untuk pendaftaran jenjang SMA, SMK, dan SLB. Pemerintah beralasan hal itu terjadi akibat membludaknya pendaftar yang mengakses situs secara bersamaan. Di Jawa Timur (Jatim) proses pengambilan PIN untuk SPMB jenjang SMA/SMK Negeri dikeluhkan masyarakat karena harus antri sejak subuh. Dijelaskan proses pendaftaran sekolah dilaiukan secara online tapi ada yang offline. Setelah mendaftar secara online, siswa harus mengambil PIN secara langsung di sekolah yang ditunjuk. Ironisnya, setelah mengantre lama, banyak yang gagal mendapatkan PIN karena kuota penuh. Tak hanya kekuhan soal sistem dan teknologi, tapi dugaan ada kecurangan juga bermunculan. Di Kota Bandung ada dugaan jual-beli kursi yang dibanderol Rp 5 juta-8 juta/kursi. Polri turun tangan menyelidiki dan mengingatkan masyarakat bila kecurangan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana. Sanksi hukum tidak hanya akan dijatuhkan kepada pihak yang menerima pungli, tetapi juga kepada pemberinya.

Baca Hal 11...



KISRUH BERULANG PENERIMAAN MURID BARU

Dugaan Jual-Beli Kursi, Server Error hingga Antrean PIN

KUOTA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

PPDB

Jenjang	Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi
SD	Min 70%	Maks 15%	Maks 5%	Tidak ada
SMP	Min 50%	Maks 15%	Maks 5%	Sisa Kuota
SMA	Tidak ada	Maks 15%	Maks 5%	Sisa Kuota

SPMB

Jenjang	Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi
SD	Min 70%	Maks 15%	Maks 5%	Maks 10%
SMP	Min 50%	Maks 15%	Maks 5%	Maks 30%
SMA	Tidak ada	Maks 15%	Maks 5%	Maks 40%

JALUR PRESTASI NON-AKADEMIK

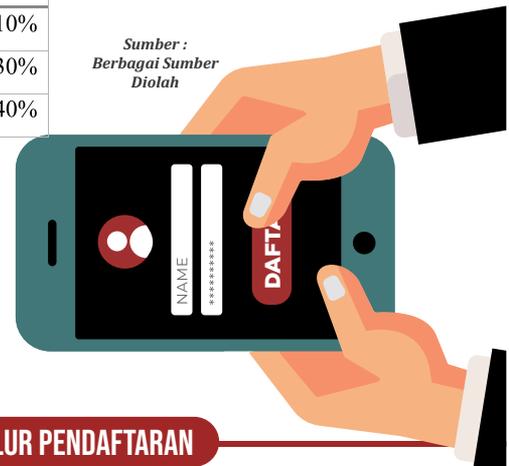
PPDB

Calon peserta didik baru memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga.

SPMB

Calon murid baru memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga, ditambah bidang kepemimpinan dan organisasi kesiswaan, seperti OSIS dan Pramuka.

Sumber :
Berbagai Sumber
Diolah



JALUR PENDAFTARAN

PPDB

- Zonasi
- Afirmasi
- Perpindahan tugas orang tua/wali
- Jalur prestasi

SPMB

- Zonasi
- Afirmasi
- Prestasi dan minat (untuk SMP & SMA)
- Jalur tidak ada penambahan

Yadnya Kasada 2025

Warga Suku Tengger memadati Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025) untuk berdoa saat upacara Yadnya Kasada. Perayaan Yadnya Kasada merupakan upacara adat Suku Tengger sebagai bentuk ucapan syukur kepada Sang Hyang Widhi, dan penghormatan leluhur. Diketahui, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melakukan penutupan kawasan wisata TNBTS pada 10-13 Juni. (Antara.ist)



PRABOWO OPTIMISTIS INDONESIA BEBAS DARI KEMISKINAN SEBELUM 2045

Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Prabowo mengaku telah mempelajari data secara keseluruhan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto mengutarakan optimismenya Indonesia bisa bebas dari kemiskinan pada tahun 2045. Keyakinan itu berkaca pada bonus demografi pada tahun 2045.

Prabowo mengatakan saat ini banyak anak muda Indonesia yang berusia 20 hingga 30 tahun sehingga pada 20 tahun ke depan, mereka pun berpotensi memimpin Indonesia pada 2045 mendatang.

"Tahun 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30 tahun, maka 20 tahun lagi mereka yang akan memimpin republik ini," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Indodefence Expo dan Forum yang berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Bahkan Prabowo berkomitmen untuk membawa Indonesia bebas dari kemiskinan sebelum 2045. Ia yakin setelah mempelajari data-data secara keseluruhan.

"Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045 itu keyakinan sana dan itu tekad saya," kata Prabowo.

Indodefence Expo dan Forum adalah sebuah pameran penjualan peralatan pertahanan berteknologi tinggi dan persenjataan dwitahunan serta acara promosional untuk pabrik-pabrik alat keamanan dan pertahanan internasional, yang diadakan sejak 2004. Pada tahun ini, acara ini diselenggarakan selama 4 hari yakni 11-14 Juni 2025

Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.



Presiden Prabowo Subianto menandatangani kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV "PANDU", dalam ajang Indo Defence 2025 Expo & Forum yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025). (BPPI Setpres)

DPR: Jangan Berdebat Jumlahnya

Beda angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bank Dunia menjadi polemik. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menetapkan standar garis kemiskinan nasional.

Menurutnya, standar tersebut sudah lama digunakan dan menjadi acuan dalam berbagai program pembangunan, sehingga tidak bisa begitu saja diubah hanya karena ada standar baru dari lembaga internasional.

"Pemerintah punya standar sendiri, dan standar itu sudah dipakai konsisten dengan itu karena semua program pembangunan diparalelkan dengan data kemiskinan yang sudah diakui," ujar Misbakhun kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Pernyataan ini menanggapi usulan sejumlah pihak agar pemerintah melakukan revisi atas standar garis kemiskinan nasional menyusul Bank Dunia.

Misbakhun menyebut pendekatan lembaga-lembaga asing terhadap

Indonesia memiliki perspektif masing-masing yang belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebijakan nasional.

"Cara pandang mereka terhadap Indonesia kan masing-masing berbeda," jelas politisi Partai Golkar itu.

Misbakhun menegaskan, esensi utama dari kebijakan pengentasan kemiskinan bukan sekadar perdebatan mengenai jumlah orang miskin. Melainkan efektivitas program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita enggak usah berdebat berapa jumlah rakyat miskin, tapi bagaimana mengetaskan kemiskinan itu," jelas Misbakhun.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan, khususnya yang berada pada desil 1 sampai desil 4.

Menurutnya, kelompok ini masih tergolong dalam kategori kemiskinan, meski dengan tingkat dan karakteristik berbeda.

"Program itu yang dikuatkan, jangan sampai kemudian kita desil ini kan tidak keluar-keluar," katanya. (wid,rla,ant/dya)

Bank Dunia: Dari 10 Orang Indonesia yang 7 Miskin

WORLD Bank atau Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan dan ketimpangan global per Juni 2025. Akibatnya, jumlah orang miskin di dunia termasuk Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Begini potretnya.

Berdasarkan dokumen Bank Dunia bertajuk 'June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)', Bank Dunia mengganti standar orang miskin alias duafa di dunia.

Sebelumnya menggunakan Purchasing Power Parities (PPP) 2017 kemudian di-update menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan pada Mei 2024 oleh International Comparison Program. Di mana, standar kemiskinan menurut PPP 2021 lebih tinggi ketimbang PPP 2017.

Dalam hal ini, Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan melalui PPP untuk menyesuaikan daya beli antar negara yang berbeda antara PPP 2017 dan PPP 2021. Dan, PPP merupakan perbandingan harga barang dan jasa yang sama di

berbagai negara, setelah nilai tukar mata uangnya disesuaikan.

Untuk diketahui, nilai tukar dolar AS yang digunakan untuk PPP, bukanlah nilai kurs nilai saat ini, melainkan paritas daya beli.

Perubahannya meliputi international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem, berubah dari 2,15 dolar AS, menjadi 3 dolar AS per orang per hari.

Sedangkan untuk negara berpendapatan menengah bawah (Lower Middle Income/LMI) berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per orang per hari.

Otomatis, patokan kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income/UMI) berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per orang per hari.

Karena standarnya naik, berdampak kepada jumlah penduduk miskin menjadi lompat. Misalnya, Asia Timur dan Pasifik, pada September 2024, jumlah

penduduk miskin sebanyak 20,3 juta orang. Atau setara 1 persen jika menggunakan patokan PPP 2017. Namun jika menggunakan PPP 2021 maka jumlah rakyat miskin naik menjadi 54 juta orang, atau setara 2,5 persen pada Juni 2025. Terjadi kenaikan 1,5 persen.

Secara global, jumlah penduduk miskin pada Juni 2025, mencapai 838 juta orang atau setara 10,5 persen, jika menggunakan patokan PPP 2021. Atau melejit 27,3 persen jika menggunakan standar PPP 2017 yang jumlah warga miskin hanya 134 juta orang, pada September 2024. Revisi PPP ini, dilakukan Bank Dunia lantaran menyesuaikan dengan terjadinya lonjakan harga.

Untuk Indonesia, karena pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) mencapai 4.810 dolar AS pada 2023, menurut standar Bank Dunia, masuk kategori negara menengah atas (UMI). Di mana, batas GNI untuk UMI ditetapkan Bank Dunia di kisaran 4.466-13.845 dolar AS per kapita. (wid,ist,kum/dya)

Polemik Tambang di Raja Ampat DPR DESAK INVESTIGASI PEMBERI IZIN

DPR mendorong adanya investigasi terhadap pihak yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Para wakil rakyat juga akan memanggil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, pemberian izin tambang di kawasan Raja Ampat yang memiliki nilai ekologis tinggi merupakan bentuk kelalaian serius.

"Kita tidak bisa hanya berhenti pada pencabutan izin. Harus ada investigasi mendalam terhadap siapa yang mengeluarkan izin tambang di kawasan konservasi sekelas Raja Ampat. Ini pelanggaran serius terhadap UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan," ujar Daniel lewat keterangan tertulisnya, Rabu (11/6/2025).

Ia mengatakan, masuknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan pemberian izin dan lemahnya pengawasan.

Oleh sebab itu, Daniel meminta Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas.

Ditekankan, Raja Ampat merupakan salah satu ekosistem laut dan darat yang harus dilindungi dari aktivitas eksploitasi. "Raja Ampat itu harta karun biodiversitas dunia. Kita harus bertanya, bagaimana mungkin izin tambang bisa keluar di sana? Siapa yang memuluskan jalannya?" ujar Daniel.

Di samping itu, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut IUP dari empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang mendengarkan aspirasi penolakan terhadap aktivitas pertambangan di sana.

Panggil Bahlil soal PT GAG

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol

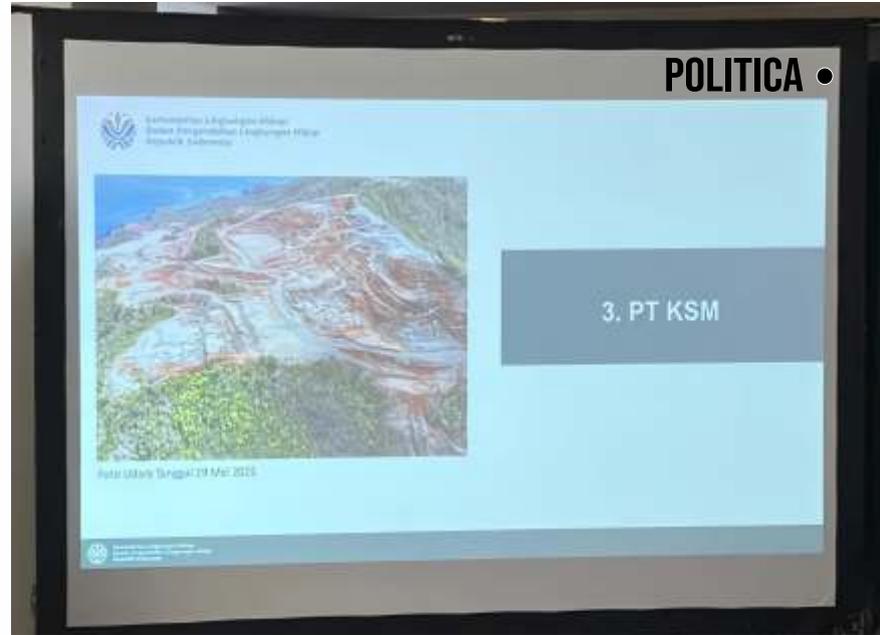
Nurofiq hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sugeng menyebut, pemanggilan itu terkait dengan polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. DPR ingin meminta penjelasan secara lengkap terkait masalah yang ada, dari izin tambang sampai potensi kerusakan lingkungan yang ada.

"Secepatnya kita akan agendakan. Bahkan ini karena sudah terlanjur kemarin itu lantasi viral. Kebetulan Menteri ESDM berkunjung ke daerah tersebut, sebelum itu pun kami sudah berencana (ke sana) karena ada aspirasi dari masyarakat sana," kata Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Ia mengaku sudah mendapat aduan dari masyarakat terkait PT GAG Nasional (PT GN) yang mestinya memperbaiki tata kelola tambang di Raja Ampat. Namun, PT GN yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam) ini izin tambangnya tidak dicabut oleh pemerintah.

Diketahui, hanya 4 izin yang dicabut. Keempat perusahaan tambang tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di



Kementerian Lingkungan Hidup (LH) memperlihatkan foto kondisi terkini lokasi tambang di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Minggu (8/6/2025). (dok.ist)

Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyafun, PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran, dan PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.

Komisi XII DPR akan memanggil Bahlil berserta Hanif Faisol sesuai masa reses DPR. Adapun reses DPR RI dimulai pada 28 Mei hingga 23 Juni 2025 dan masa sidang baru dimulai pada 24 Juni 2025.

"Secepatnya setelah reses, bahkan kemarin apa yang disebut commander call di antara kami, begitu naik menjadi masalah besar karena sudah viral dan sebagainya, maka kami sepakat (memanggil)," paparnya. (din,rls,ist,mol/dya)

PERUSAHAAN TAMBANG YANG DICABUT IZINNYA

- **PT Anugerah Surya Pratama (ASP)**
Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran.
- **PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)**
Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.
- **PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)**
PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha.
- **PT Nurham**
Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waigeo.



Bareskrim Selidiki Dugaan Pidana

BARESKRIM Polri turun tangan untuk menyelidiki dugaan pidana dalam aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Proses ini dilakukan karena tambang nikel ini sudah menyita perhatian publik.

"Jadi begini, sementara ini saya belum bisa memberikan statemen ya, kita masih dalam penyelidikan," kata Direktur Tidak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan hal ini sudah sesuai dengan beberapa temuan penyidik di lapangan.

"Pasti lah (lakukan penyelidikan). Sesuai dengan undang-undang kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita enggak boleh menyelidiki," kata Nunung.

Nunung mengatakan setiap aktivitas pertambangan akan menyebabkan kerusakan alam.

Namun, dalam prosedurnya, pihak pengelola tambang diwajibkan melakukan reklamasi pada bekas lokasi penambangan untuk memulihkan ekosistemnya.

"Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Tambang mana yang enggak ada kerusakan lingkungan saya mau tanya. Cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi," jelas dia.

Meski begitu, Nunung enggan menjelaskan secara rinci terkait proses penyelidikan yang dilakukan. Dia hanya membenarkan bahwa penyelidikan dilakukan terkait dengan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang telah dicabut pemerintah.

"Iya (soal 4 IUP yang dicabut). (Pulau Gag) nanti kita lihat dulu," terangnya.

Berbeda dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau suap dalam penerbitan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, menyebut penelusuran baru bisa dilakukan jika ada laporan resmi dari masyarakat.

"Kalau ada laporan pengaduannya," kata Harli saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (10/6/2025), menjawab kemungkinan Kejagung mengusut dugaan suap atau pelanggaran IUP di kawasan tersebut. (wid,din,rls/dya)

Sidang Mafia Judol di Komdigi

MENCUAT 'TIM MENTERI' HINGGA 'RESTU' BUDI ARIE

Terdakwa Denden Imadudin, eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pengamanan situs judi online (judol) di Kementerian Kominfo, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mencuat istilah 'Tim Menteri' dan keterangan bila atasannya saat itu yaitu Budie Arie mengetahuinya.



Sidang lanjutan kasus dugaan judi online Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).ist

Pengamanan situs judi online di Kominfo ternyata sempat berhenti pada awal 2024. Namun praktik itu kembali berlanjut setelah Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi, disebut mengetahuinya.

Hal itu terungkap dari keterangan terdakwa Denden Imadudin Soleh yang dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus pengamanan situs judi online Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Denden bersaksi untuk terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Mulanya, Denden bercerita sempat didatangi oleh terdakwa Muhrijan yang meminta bagian atas pengamanan situs judi online tersebut pada awal 2024. Namun, Denden menyatakan bahwa praktik tersebut telah berhenti karena posisinya saat itu digantikan oleh terdakwa Syamsul Arifin.

"Saya sampaikan bahwa saya sudah pindah dan sudah tidak ada penjagaan (situs judol). Dan kemudian juga ada tim menteri yang mengawasi," ujar Denden.

"Tim menteri seperti apa yang saudara maksud?" tanya jaksa.

"Waktu itu kebetulan baru masuk saudara Adhi Kismanto," jawab Denden.

"Sekitar bulan apa?" tanya jaksa.

"Masuknya sekitar bulan Desember (2023), seleksinya sekitar bulan Februari (2023)," ucap Denden.

"Kemudian?" cecar jaksa.

"Kemudian pada saat Desember atau Januari itu saya dipindah ke tim penyidikan digantikan oleh saudara Syamsul dan juga ada tim menteri maka sebetulnya praktik itu sudah setop," jelas Denden.

Kemudian, sekitar pertengahan 2024, Denden kembali diundang dalam sebuah pertemuan di salah satu

mal kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di situ, Denden bertemu dengan Adhi Kismanto, Alwin Jabarti, Syamsul Arifin, dan Muhrijan.

"Membicarakan apa waktu itu?" tanya jaksa.

"Waktu itu hanya disampaikan bahwa ini sudah oke. Bahwa ini bisa berjalan lagi, penjagaan ini. Sehingga tidak perlu khawatir, karena sudah diketahui oleh yang di atas," ujar Denden.

"Oke. Tadi saudara bilang ini sudah oke, ini sudah diketahui yang di atas. Siapa yang bicara pada saat itu?" cecar jaksa.

"Waktu itu saudara Muhrijan dan saudara Adhi," beber Denden.

"Sudah diketahui oleh yang di atas.

Siapa yang dimaksud mereka?" tanya jaksa lagi.

"Yang mereka maksud adalah Pak Menteri pada waktu itu menjabat," ungkap Denden.

Cara Amankan Situs Judol

Denden Imadudin Soleh, mengungkapkan bagaimana ia melindungi situs judi online (judol) agar tidak diblokir oleh instansinya sendiri.

"Jadi, ketika masuk dalam patroli atau laporan masyarakat, maka website yang ada itu dikecualikan untuk diblokir," ujar Denden.

"Terkecuali jika ada atensi dari pimpinan atau lembaga lain, maka

kami akan pastikan, 'ini tidak bisa kami jaga. Ini pasti akan diblokir', kita informasikan," lanjutnya.

Denden mengaku berkoordinasi dengan Alwin Jabarti Kiemas, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama, untuk menjaga agar situs-situs judol tidak diblokir.

Tarif yang dipatok adalah sebesar Rp 4 juta per situs. Dalam menjalankan aksinya, Denden bekerja sama dengan bawahannya, yakni Fakhri Dzulfiqar, Yudha Rahman Setiadi, dan Yoga Priyanka Sihombing.

Situs-situs yang diminta untuk dijaga oleh Alwin akan difilter terlebih dahulu oleh tim Denden sebelum diajukan ke Tim Infrastruktur Digital Kementerian Kominfo. "Iya, jadi apa yang disampaikan ke saya adalah sesudah dibersihkan semua. (Setelah itu diserahkan) kepada saudara Riko (Tim Infrastruktur Digital) untuk diblokir," kata Denden.

Selama menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal, Denden menjalankan praktik ini sejak September 2023 hingga Januari 2024. Ia kemudian dipindahtugaskan menjadi Ketua Tim Penyidikan dan Ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kementerian yang sama. (wid,rls,kcm/dya)

Diteror karena Blokir Situs Judi

MANTAN Kepala Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Kominfo, Syamsul Arifin, mengaku sempat mendapat ancaman dan teror karena memblokir situs judi online.

Hal itu diungkapkan Syamsul saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus dugaan pengamanan situs judi online Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025).

Dia bersaksi untuk terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Syamsul merupakan kepala tim menggantikan Denden Imadudin Soleh. Posisi itu diembannya sekitar Februari 2024.

"Nah di Februari itu saya melakukan pemblokiran terhadap 2.000 situs yang ternyata dijaga oleh teman-teman," ujarnya.

"Jadi ada cerita ketika saya memblokir 2.000 situs itu kemudian

saya diancam dan diteror," tambah dia.

Jaksa lalu menggali sosok yang meneror dan mengancam Syaiful tersebut. Namun dia mengaku tak tahu.

"Diancam dan diteror oleh?" tanya jaksa.

"Saya tidak tau, tetapi pada saat itu saya mendapatkan kabar, saya akan dipindahkan pada saat itu," jelasnya.

Denden kemudian mencoba mencari tahu sosok dibalik situs-situs judi online yang dia blokir. Ia kemudian bertanya kepada Yoga Priyanka Sihombing yang merupakan mantan anak buah Denden.

"Kemudian di bulan Februari akhir pun saudara Denden menemui saya bahwa ternyata yang 2000 itu adalah dijaga oleh teman-teman sebelumnya. Kemudian saya diberikan uang sekitar SGD 15.000," ucapnya.

"Siapa yang kasih?" tanya jaksa.

"Denden," jelasnya.

Dalam dakwaannya, Denden didakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Denden juga didakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Akibat perbuatannya, Denden didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (din,rls,ant/dya)



Jamaah haji wafat usai disalatkan di Masjidil Haram, Makkah.ist

Jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat pada tahun ini menurun signifikan dibanding sebelumnya..Hingga Rabu (11/6/2025) pukul 06.00 WIB, jumlah jamaah meninggal mencapai 221 orang.

Taruna juga mengusulkan sejumlah langkah untuk peningkatan pelayanan haji. Di antaranya penambahan tenaga kesehatan, komunikasi antarnegara, dan pembatasan usia jemaah.

"Kami menyarankan usia jemaah dibatasi maksimal 65 tahun untuk pelaksanaan haji tahun depan," ujarnya. Usulan lainnya adalah mendirikan fasilitas kesehatan permanen di Arab Saudi.

Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Edi Supriyatna, mengungkapkan ada 35 pasien yang dirawat di KKHI usai Armuzna.

"Pasien yang saat ini di KKHI Makkah berjumlah 35 pasien,

KEMENAG: ANGKA KEMATIAN JAMAHAH HAJI INDONESIA TURUN SIGNIFIKAN

tentunya kami akan terus berusaha untuk pasien ini kita kembalikan ke kloternya," kata Edi di KKHI Makkah, Rabu (11/6/2025).

Edi mengatakan jamaah sakit yang sudah kembali ke kloter itu tentunya dalam kondisi kesehatan yang lebih baik. Harapannya agar jemaah itu bisa pulang ke Indonesia bareng kloternya.

"Jadi intinya pasien dengan gangguan kesehatan yang kalau dia semakin lama beraktivitas di Arab Saudi semakin memperberat penyakitnya itu kita usahakan dipulangkan lebih dulu, tentunya dengan syarat ibadahnya itu sudah lengkap," ujar Edi.

Selama beroperasi di musim haji 2025, KKHI telah merawat kurang lebih 200 jemaah haji. Penyakit yang diobati beragam. Apabila perlu

tindakan besar seperti operasi, jamaah haji itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi.

"Ada beberapa memang jemaah haji yang dirawat di KKHI itu menderita berbagai macam penyakit terutama penyakit jantung, penyakit paru, dan juga ada penyakit demensia itu yang ada di KKHI Makkah," ungkap Edi.(wid,ist,ant,rls/dya)

Menurut anggota Tim Amirul Hajj 2025, Taruna Ikrar, mayoritas kasus kematian disebabkan oleh penyakit jantung, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Cuaca ekstrem menjadi tantangan utama selama pelaksanaan puncak haji dengan suhu melebihi 40 derajat Celsius," ujarnya.

Hingga Rabu (11/6/2025) pukul 06.00 WIB, jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal mencapai 221 orang. Angka tersebut berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagai perbandingan, angka kematian jemaah haji Indonesia pada 2024 mencapai 461 orang. Sementara dua tahun lalu tercatat 775 jamaah haji Indonesia meninggal dunia.

Taruna menyatakan selain cuaca ekstrem, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia tidak sebanding dengan total jemaah. "Hanya ada 57 dokter untuk melayani 221 ribu jamaah," ucap Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ini.

Karena itu, Taruna mengatakan pihaknya berstrategi dan menjalin koordinasi ketat agar layanan tetap optimal. Apalagi banyak jamaah haji Indonesia yang berusia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti jantung dan pneumonia.

Karena itu, tim kesehatan menyarankan jamaah tetap berada di dalam tenda antara pukul 10.00 hingga 16.00. "Kami juga mengingatkan pentingnya konsumsi air untuk mencegah dehidrasi dan heatstroke," ujarnya.

Empat Terobosan Haji 2025

MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengumumkan berakhirnya fase puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menag mengatakan penyelenggaraan Armuzna secara umum berjalan baik.

Meski demikian, Menag tidak menutup mata dengan beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan. Sekaligus ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah.

Namun, Menag juga mencatat sejumlah terobosan dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. "Saya bersyukur ada sejumlah hal baru dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," kata Menag saat memberikan konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, ada empat terobosan yang telah dilakukan pada operasional haji 1446 H/2025 M. Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan kesepakatan pemerintah bersama DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto.

Kedua, mencegah praktik monopoli. Ini dilakukan dengan

skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah.

Hal ini menurutnya menjadi pondasi awal dalam menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji di Saudi. "Ada beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaannya dan itu akan sangat berguna bagi perbaikan di masa mendatang," ujar Menag.

Ketiga, pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, kali pertama, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu.

Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Air.

"Bagi jamaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia, pelaksanaan dapat dilakukan melalui BAZNAS. Sampai hari ini, terkumpul ada Rp21.290.432.707, untuk 8.451 dam," kata Menag.

PERBANDINGAN WAFAT JAMAHAH HAJI (2025-2021)

Rabu (11/6/2025 pukul 06.00 WIB)



Terobosan keempat adalah penguatan ekosistem ekonomi haji. Ini merupakan program berkelanjutan sejak tiga tahun terakhir, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara.

"Ekspor bumbu nusantara meningkat tajam hingga 475 ton. Tahun 2023, ekspor bumbu nusantara sebanyak 16 ton. Tahun 2024, ekspor bumbu nusantara sekitar 70 ton," ujarnya. (ant,wid,rls/dya)

Pansus DPRD Kota Malang: Kini UMKM Mamin Beromzet Rp15 Juta Tak Kena Pajak

MALANG - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang telah menetapkan perubahan ambang batas omzet usaha yang dikenai kewajiban pajak. Dari semula Rp5 juta/bulan, kini UMKM makanan minuman (mamin) beromzet hingga Rp15 juta/bulan terbebas dari kewajiban membayar pajak daerah.

Ketua pansus perubahan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Kota Malang, Indra Permana, menjelaskan revisi ini merupakan hasil pertimbangan panjang, melibatkan para ahli, pelaku usaha, dan komunitas UMKM.

"Dulu batas omzet wajib pajak untuk usaha mamin itu Rp5 juta. Tapi akhirnya kita sepakati Rp15 juta. Ini angka yang paling realistis," ujar Indra, dikonfirmasi pada Rabu (12/6/2025).

Menurutnya, keputusan menaikkan batas omzet wajib pajak menjadi Rp15 juta per bulan diambil dengan mengedepankan prinsip keseimbangan. Antara keberpihakan kepada masyarakat kecil dan kepentingan fiskal Kota Malang.

"Jangan sampai kita hanya fokus ke masyarakat, lalu mengorbankan kondisi

fiskal daerah. Keseimbangan ini penting. Alhamdulillah, teman-teman pansus punya visi yang sama," tambahnya.

Indra optimistis, meski dari catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan ada sekitar 931 pelaku usaha kecil yang bebas pajak, tidak akan terjadi penurunan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disebutkannya, Bapenda Kota Malang diyakini telah menyiapkan strategi untuk menjaga kinerja penerimaan daerah.

"Kami sangat yakin Bapenda bisa menanganinya. Mereka sudah menunjukkan kapasitasnya selama pembahasan. Bahkan, kita optimistis tetap akan ada peningkatan PAD ke depan," katanya.

Indra juga menambahkan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak daerah. Termasuk batas omzet yang dikenai pajak. Apabila ke depan ditemukan kondisi yang berubah, menurutnya evaluasi akan menjadi dasar untuk revisi lebih lanjut.

"Ini sudah ada di poin evaluasi dan rekomendasi. Tapi ke depan tetap akan dipantau. Nanti Pak Wali dan jajarannya akan melihat dampaknya di lapangan," kata Indra.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan dengan kebijakan ini, Pemkot Malang akan kehilangan potensi PAD hingga Rp4,6 miliar. Jumlah ini berasal dari pajak usaha mamin beromzet di bawah Rp5 juta yang selama ini ikut menyumbang penerimaan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan pembahasan perubahan Ranperda PDRD sudah hampir rampung. Sesuai rekomendasi pansus, Wahyu



Ketua Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Malang, Indra Permana dalam rapat paripurna, Rabu (11/6/2025). (Santi/Lentera)

menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan teknis dari perda tersebut.

"Secara umum sudah selesai, sudah ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Yang menjadi perhatian saya tadi, setiap tahun harus ada Perwal sebagai tindak lanjut teknis," kata Wahyu. (Santi/Dya)

Dari 600 Perumahan di Kabupaten Malang, Baru 9 Serahkan PSU

(Ilustrasi) Tim dari DPKPCK Kabupaten Malang melakukan survei siteplan untuk salah satu perumahan di Kecamatan Bululawang. (dok. Instagram dpkpcptakarya)



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Johan Dwijoso Saputro, dikonfirmasi Rabu (11/6/2025).

Johan mengatakan, PSU yang dimaksud mencakup jalan lingkungan, sanitasi, rumah ibadah, ruang terbuka non-hijau, jaringan air bersih, jaringan listrik, hingga penerangan jalan umum (PJU).

Menurutnya, kondisi ini menyebabkan pelayanan pemerintah kepada warga perumahan menjadi terbatas. Pemkab tidak memiliki kewenangan memperbaiki infrastruktur perumahan yang belum menjadi aset daerah, karena dapat menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan.

"Kalau PSU belum diserahkan, ya kami tidak bisa melakukan perbaikan. Itu bisa jadi temuan. Padahal warga di

perumahan itu juga masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan," katanya.

Lebih lanjut, Johan juga menyebutkan sejumlah kendala yang menyebabkan lambatnya penyerahan PSU. Salah satunya karena pengembang masih ingin melakukan pengembangan kawasan.

Menurutnya, banyak pengembang merasa khawatir jika PSU diserahkan lebih dulu, pengembangan berikutnya menjadi terhambat karena lahan yang telah diserahkan tidak bisa lagi digunakan.

"Banyak yang sengaja mengulur waktu karena akan mengembangkan perumahan. Mereka takut kalau PSU diserahkan, akses atau lahannya nanti dibatasi," jelasnya.

Selain itu, sambung Johan, tidak sedikit perumahan lama yang pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini. Kondisi ini membuat Pemkab Malang kesulitan untuk mengurus proses penyerahan PSU.

Permasalahan lain yang cukup pelik adalah adanya pengalihfungsian PSU yang dilakukan pengembang. Johan mencontohkan, dalam siteplan

awal, ruang terbuka hijau (RTH) telah ditetapkan. Namun saat tim DPKPCK melakukan peninjauan di lapangan, fungsi lahan tersebut telah berubah.

"Contohnya ada taman yang dilaporkan sebagai RTH, ternyata saat dicek sudah berubah menjadi masjid. Pengalihfungsian seperti ini cukup sering kami temukan. Kalau sudah begitu, pengembang harus cari tanah pengganti, dan itu tidak mudah," paparnya.

Tak hanya itu, syarat PSU harus diserahkan dalam kondisi baik juga menjadi kendala tersendiri. Johan menyebut banyak PSU, khususnya PJU, dalam kondisi rusak. Sementara dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga tidak bisa menerima aset rusak karena bertentangan dengan aturan.

Kendati demikian, untuk mempercepat proses penyerahan PSU, DPKPCK Kabupaten Malang tengah mengkaji skema penyerahan secara parsial. Dengan cara ini, menurutnya pengembang dapat menyerahkan sebagian PSU yang sudah memenuhi syarat tanpa harus menunggu seluruh komponen siap. (Santi/Dya)

NAMA PRESIDEN MEKSIKO TERSERET RUSUH LOS ANGELES, ADA APA?

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum membantah keras tuduhan yang dilontarkan seorang menteri dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal dirinya mendorong aksi memprotes penggerebakan imigrasi, yang diwarnai kerusuhan, di kota Los Angeles beberapa hari terakhir.

Sheinbaum menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, bahwa dia telah "mendorong aksi protes yang disertai kekerasan".

Dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP, Rabu (11/6/2025), Sheinbaum menegaskan tuduhan Noem itu "sama sekali tidak benar".

Sheinbaum juga memposting ulang video konferensi pers harian yang dilakukannya pada Senin (9/6/2025), ketika dia mengemukakan unjuk rasa yang disertai aksi kekerasan dan menyerukan kepada warga negara Meksiko yang tinggal di AS "untuk bertindak secara damai".

"Kami selalu menentangnya (unjuk rasa yang disertai kekerasan)," tegas Sheinbaum dalam pernyataan via media sosial X pada Selasa (10/6/2025).

"Di sisi lain, posisi kami adalah dan akan terus membela warga Meksiko yang jujur dan pekerja keras yang mendukung perekonomian Amerika Serikat dan keluarga-keluarga mereka di Meksiko," ujarnya.

Unjuk rasa memprotes kebijakan imigrasi Trump, yang sebagian besar berlangsung damai, digelar mulai Jumat (6/6/2025) di Los Angeles, yang memiliki populasi besar warga negara asing dan warga Latin. Unjuk rasa serupa juga muncul di beberapa kota lainnya, seperti New York, Atlanta, Chicago, dan San Francisco.

Aksi protes itu dipicu oleh kemarahan publik yang meningkat atas rentetan penangkapan oleh otoritas imigrasi federal AS, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), terhadap orang-orang yang disebut sebagai migran ilegal atau anggota

geng kriminal.

Tindak kekerasan, seperti aksi pembakaran, penjarahan dan vandalisme, membuat unjuk rasa di Los Angeles yang awalnya damai itu berubah menjadi ricuh. Pada Senin (9/6/2025) malam, menurut kepolisian setempat, sekitar 23 pusat bisnis setempat telah dijarah. Lebih dari 500 orang ditangkap dalam beberapa hari terakhir.

Tuduhan terhadap Sheinbaum dilontarkan Noem saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (10/6/2025). Dia secara terang-terangan menyebut nama Presiden Meksiko saat melontarkan



Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. (Foto: Palacio Nasional)

tuduhannya.

"Claudia Sheinbaum muncul dan mendorong lebih banyak aksi protes di LA dan saya mengecamnya untuk hal itu. Dia seharusnya tidak mendorong unjuk rasa yang disertai kekerasan yang sedang berlangsung," ucapnya. (AFP, ist/nei)

Demo Meluas ke Texas, Garda Nasional Dikerahkan



Warga Austin di Texas berunjuk rasa memprotes kebijakan imigrasi Trump (Reuters)

AKSI demo besar-besaran untuk memprotes kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga terjadi di wilayah Texas. Gubernur Texas, Greg Abbott, bahkan mengumumkan pengerahan pasukan Garda Nasional ke negara bagian itu, yang disebutnya untuk "menjaga ketertiban".

Pengerahan pasukan Garda Nasional ke Texas ini menyusul langkah Trump memerintahkan pengerahan pasukan cadangan AS itu ke Los Angeles untuk mendukung penegakan hukum saat unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan marak terjadi.

"Garda Nasional Texas akan dikerahkan ke lokasi-lokasi di seluruh negara bagian untuk

memastikan perdamaian dan ketertiban," kata Abbott dalam pengumumannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Rabu (11/6/2025).

"Unjuk rasa damai adalah legal. Melukai orang atau properti adalah ilegal dan akan memicu penangkapan," tegas gubernur negara bagian dari Partai Republik ini.

"@TexasGuard akan menggunakan setiap sarana dan strategi untuk membantu para penegak hukum mempertahankan ketertiban," ujar Abbott.

Terinspirasi oleh unjuk rasa di Los Angeles, seperti dilansir CNN, para demonstran di Texas berkumpul dalam jumlah besar untuk menentang penindakan keras imigrasi yang dilakukan pemerintahan Trump.

Sama seperti California yang menjadi lokasi Los Angeles, Texas yang dijuluki sebagai Lone Star State ini juga menjadi rumah bagi salah satu populasi imigran terbesar di AS. Dalam beberapa hari terakhir, para demonstran mengatakan mereka menyuarakan aspirasi anggota

MISI MARINIR AS

Menurut keterangannya

- Marinir ditugaskan melindungi properti dan personel federal seperti fasilitas ICE, tanpa wewenang penegakan hukum.
- Mereka juga mengawal 2.100 personel Garda Nasional di Los Angeles.

Konteks Pengerahan

- Dikerahkan setelah empat malam protes anti-penggerebakan imigrasi yang berujung kerusuhan dan penjarahan.
- Presiden Trump mengerahkan 4.000 Garda Nasional dan 700 Marinir untuk memperkuat keamanan.
- Gubernur Gavin Newsom dan Wali Kota Karen Bass mengemukakan pengerahan ini, menyebutnya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi melanggar Undang-Undang Posse Comitatus.

Poin penting

- Ini pertama kalinya sejak 1992 Marinir aktif diturunkan untuk konflik domestik.
- Marinir dan Garda Nasional berstatus non-penegak hukum: hanya berjaga, tidak menangkap.
- Penempatan ini menuai kritik tajam dari pejabat negara bagian, aktivis HAM, dan politisi Demokrat.

komunitas mereka.

"Imigran adalah tulang punggung masyarakat kita. Sekali lagi, mereka adalah kita semua. Mereka adalah anggota keluarga kita. Mereka adalah anggota masyarakat kita," kata Laiba Khan, penyelenggara aksi dari Partai Sosialisme dan Pembebasan, saat berbicara kepada media lokal KEYE, afiliasi CNN.

Aksi yang awalnya merupakan unjuk rasa solidaritas di kota Austin, Texas, berubah menjadi ricuh pada Senin (9/6/2025), ketika polisi setempat menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang berkumpul di luar Gedung Federal JJ Pickle, yang mereka sebut sebagai pertemuan yang melanggar hukum. (AFP, CNN, ist/nei)

Bukan Rutinitas Biasa, Ini Manfaat Bangun Pagi

Apakah kamu pernah penasaran mengapa begitu banyak orang sukses terbiasa bangun di pagi hari? Ternyata, kebiasaan ini bukan sekadar rutinitas biasa. Ada begitu banyak manfaat luar biasa yang bisa kamu rasakan, mulai dari aspek fisik, mental, hingga spiritual.

Bangun pagi membuka peluang berharga untuk memulai hari dengan suasana yang lebih damai dan teratur. Terburu-buru di pagi hari sering menjadi penghambat produktivitas dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Dengan bangun lebih awal, kamu bisa menyiapkan diri dengan lebih maksimal, mengurangi tekanan, dan menjaga konsentrasi tetap terjaga sepanjang hari. Berikut pembahasan lengkap tentang berbagai manfaat bangun pagi yang mungkin belum kamu sadari.

Kesehatan Fisik

Salah satu manfaat utama bangun pagi adalah memberikanmu waktu untuk mempersiapkan sarapan sehat. Sarapan adalah kunci untuk memulai hari dengan energi yang optimal. Dengan

bangun lebih awal, kamu bisa menghindari godaan makanan cepat saji dan memilih menu sarapan yang kaya nutrisi.

Selain itu, bangun pagi juga memberimu kesempatan untuk melakukan perawatan kulit dengan lebih seksama. Membersihkan wajah dan menggunakan pelembap di pagi hari dapat membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulitmu.

Bangun pagi juga memberikanmu waktu untuk berolahraga sebelum memulai aktivitas harian. Olahraga pagi terbukti efektif meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan jantung, dan metabolisme tubuh. Kamu bisa memilih berbagai jenis olahraga yang sesuai dengan preferensi dan kondisi fisikmu, mulai dari jogging, yoga, hingga bersepeda.

Rutinitas bangun pagi yang konsisten juga dapat meningkatkan kualitas tidurmu. Tubuh akan terbiasa dengan siklus tidur-bangun yang teratur, sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan segar.

Secara ilmiah, bangun pagi memberikan peluang untuk menyerap sinar matahari pertama yang kaya akan vitamin D, yang sangat penting untuk kesehatan tulang dan imunitas. Udara pagi yang segar juga lebih kaya oksigen, sehingga baik untuk paru-paru dan otak.

Bangun sebelum atau saat subuh membuka peluang besar untuk menjalani hari dengan tubuh dan sehat

Kesehatan Mental

Paparan sinar matahari pagi meningkatkan produksi serotonin, hormon yang terkait dengan kebahagiaan dan mengurangi risiko depresi. Hal ini membuat seseorang merasa lebih tenang dan positif sepanjang hari. Waktu pagi yang tenang dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan harian, meningkatkan fokus dan produktivitas. Memulai hari dengan tenang dan terorganisir dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan.

Bangun pagi memberikanmu waktu untuk merenung, bermeditasi, atau sekadar menikmati ketenangan sebelum hiruk pikuk kehidupan dimulai. Aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kesadaran diri.

Selain itu, bangun pagi juga memberimu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti membaca buku, menulis jurnal, atau mengembangkan hobi. Aktivitas ini dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan rasa bahagia.

Tak heran jika banyak tokoh sukses dunia menjadikan bangun jam 5 pagi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Waktu pagi yang tenang dinilai mampu memberikan ruang refleksi, perencanaan, hingga memulai hari dengan energi yang lebih positif. Beraktivitas sejak dini hari

memberikan kita kesempatan untuk mencuri start sebelum dunia benar-benar sibuk.

Segi Spiritual

Bagi sebagian orang, bangun pagi memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam Islam, bangun pagi merupakan anjuran yang dikaitkan dengan doa dan keberkahan dari Rasulullah SAW. Waktu pagi dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah SWT.

Selain itu, bangun pagi juga dikaitkan dengan kesempatan untuk meraih rezeki dan keberuntungan. Banyak orang percaya bahwa bangun pagi membuka pintu rezeki dan memudahkan urusan.

Waktu pagi juga dianggap sebagai waktu yang baik untuk beribadah dan melakukan amal kebaikan. Shalat subuh, membaca Al-Quran, dan berdzikir di pagi hari dapat meningkatkan keimanan dan ketenangan hati. Bangun pagi juga merupakan bentuk ketaatan dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan bangun pagi, kamu menunjukkan kesungguhanmu dalam beribadah dan mencari ridha-Nya.

Islam telah menggarisbawahi pentingnya waktu pagi sebagai waktu yang penuh keberkahan. Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." (HR. Abu Dawud). Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya waktu pagi dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW mendoakan agar umatnya mendapatkan keberkahan di waktu pagi.

Membiasakan diri bangun pagi memang membutuhkan komitmen dan disiplin. Namun, dengan strategi yang tepat, kamu pasti bisa melakukannya. (nei,ist/dya)



Studi Ungkap Bulan Simpan Logam Mulia Rp 16.300 T

Bulan mungkin akan menjadi tempat bagi manusia mencari harta karun logam mulia langka di masa depan. Sebab, menurut studi yang terbit di jurnal *Planetary and Space Science*, satelit alami Bumi tersebut diyakini menyimpan sejumlah besar logam mulia dengan nilai estimasi lebih dari 1 triliun dolar AS, atau setara sekitar Rp 16.300 triliun (dengan kurs Rp 16.298).

Konon, logam mulia tersebut berada di dalam kawah-kawah Bulan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 mengungkap bahwa terdapat lebih dari 109.000 kawah baru yang terbentuk di kawasan lintang rendah dan menengah Bulan.

"Kawah Bulan terbentuk saat asteroid, meteoroid, atau komet yang biasanya bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, menukik ke permukaan Bulan," jelas NASA.

"Energi objek tersebut—yang ditentukan oleh ukuran, kepadatan, dan kecepatan—serta jenis permukaan yang ditabraknya dan sudut tabrakannya, semua menjadi faktor yang menentukan jenis kawah yang terbentuk akibat benturan dahsyat."

Benturan antara asteroid dan permukaan Bulan ini memungkinkan jejak logam mulia tertinggal. Sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Martin Elvis, ilmuwan dari Center for Astrophysics — Harvard & Smithsonian, mencoba memperkirakan jumlah asteroid dekat Bumi yang mengandung bijih logam

mulia pada 2014.

Kemudian, tim periset baru yang dipimpin oleh ilmuwan dan astronom independen, Jayanth Chennamangalam, menerapkan teknik probabilistik ini pada asteroid yang menghantam permukaan Bulan, dan mencoba memperkirakan berapa banyak sisa asteroid mengandung bijih yang berada di Bulan.

Ini adalah tugas yang sulit karena para peneliti harus menilai ukuran penumbuk, logam yang dikandungnya, dan berapa banyak asteroid yang akan menghantam Bulan dengan kecepatan yang dapat mempertahankan logam mulai tetap di permukaan Bulan.

Menariknya, mereka menemukan hampir 6.500 kawah berpotensi mengandung logam mulia dalam jumlah yang layak untuk ditambang secara komersial.

"Ketika kami mempertimbangkan kawah pada atau di atas ambang batas diameter 1 km, kami memperkirakan batas atas kawah dengan sisa-sisa asteroid yang mengandung sejumlah

besar logam golongan platinum dan batas atas kawah dengan sisa-sisa asteroid yang mengandung sejumlah besar air dalam bentuk mineral terhidrasi," papar tim dalam studinya.

"Untuk ambang batas yang lebih konservatif yaitu 5 kilometer, kami memperkirakan kawah dengan sisa-sisa asteroid yang mengandung sejumlah besar logam golongan platina. Nilai-nilai ini satu hingga dua kali lipat lebih besar daripada jumlah asteroid dekat Bumi yang mengandung bijih yang diperkirakan oleh Elvis (2014), yang menyiratkan bahwa mungkin lebih menguntungkan untuk menambang asteroid yang telah menabrak Bulan daripada yang berada di orbit."

Menurut perkiraan kasar yang diberikan oleh Chennamangalam

kepada *New Scientist*, mungkin ada harta karun platinum berharga dan logam lainnya senilai lebih dari Rp 16.300 triliun yang tersimpan di Bulan.

"Saat ini, astronomi dilakukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita," papar peneliti dalam studinya.

"Astronomi memiliki sangat sedikit aplikasi praktis dan sebagian besar dibiayai oleh uang pembayar pajak, yang berarti bahwa pendanaan penelitian bergantung pada kebijakan pemerintah. Jika kita dapat memonetisasi sumber daya luar angkasa—baik di bulan maupun di asteroid—perusahaan swasta akan berinvestasi dalam eksplorasi Tata Surya." (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Kalung Emas Panjang untuk Hijaber, Simpel dan Memikat

Menggunakan hijab bukanlah halangan untuk tetap tampil menarik dengan beragam aksesoris. Salah satu jenis perhiasan yang tetap bisa terlihat menonjol meski berhijab adalah kalung emas panjang. Berkat desainnya yang menjuntai, kalung ini tetap tampak di luar hijab dan mampu menambahkan sentuhan elegan pada penampilanmu.

Bagi perempuan berhijab, memilih kalung emas perlu dipikirkan dengan lebih cermat. Hal-hal seperti kenyamanan, panjang kalung, dan desain liontin harus disesuaikan dengan gaya busana yang dikenakan. Kalung yang terlalu pendek bisa tertutup oleh hijab, sementara yang terlalu besar justru bisa mengurangi rasa nyaman saat dipakai.

Jika kamu sedang mencari inspirasi kalung emas panjang yang pas untuk dipakai saat berhijab, baik untuk acara resmi maupun kegiatan sehari-hari, berikut adalah rekomendasi model kalung yang simpel, elegan, dan tetap syar'i.

Rantai Polos Panjang

Kalung rantai panjang yang tidak memiliki liontin atau yang memiliki desain anyaman tipis adalah pilihan yang aman dan elegan untuk para hijaber. Model ini menekankan kesederhanaan, sehingga bisa dipakai setiap hari tanpa memberikan kesan berlebihan.

Panjang kalung yang ideal, yaitu sekitar 55-65 cm, memastikan kalung tetap terlihat meskipun kamu mengenakan jilbab yang menutupi dada. Kamu dapat memadukannya dengan berbagai jenis pakaian seperti tunik, gamis, atau blouse kerja. Sebagai aksesoris emas, kalung rantai polos ini sangat cocok untuk menjadi koleksi

pertama bagi kamu yang ingin mulai menggunakan aksesoris dalam gaya berhijab.

Liontin Minimalis

Kalung yang dilengkapi dengan liontin kecil berbentuk bulatan, inisial nama, atau simbol sederhana menciptakan nuansa yang personal dan menarik. Desain ini sangat sesuai untuk dikenakan di kantor maupun acara yang bersifat semi-formal.

Penting untuk memilih liontin dengan ukuran yang tidak terlalu besar, sehingga tidak memberikan beban berlebih pada rantai panjang dan tetap nyaman saat dikenakan, meskipun hijab menutupi sebagian leher.

Layer Panjang Dua Tingkat

Kalung bertingkat atau yang sering disebut layered necklace kini semakin diminati oleh perempuan yang mengenakan hijab. Umumnya, kalung ini terdiri dari dua hingga tiga rantai tipis yang memiliki panjang berbeda-beda.

Model ini menambahkan kesan stylish dan modern, sehingga sangat cocok untuk dipadukan dengan hijab yang polos serta atasan yang sederhana.

Sebaiknya, pilihlah desain yang tidak terlalu ramai agar penampilan tetap terlihat anggun dan elegan.

Layered necklace sangat ideal untuk dikenakan saat menghadiri berbagai acara spesial, seperti undangan resmi, pertemuan keluarga, atau saat merayakan momen Lebaran. Dengan pemilihan yang tepat, kalung ini dapat menjadi aksesoris yang mempercantik penampilan sekaligus menambah rasa percaya diri.

Liontin Berlian atau Permata Kecil

Kalung yang dilengkapi dengan liontin batu mulia berukuran kecil, seperti berlian, zircon, atau safir, mampu memberikan kesan mewah tanpa terlalu mencolok. Ini menjadi pilihan sempurna bagi mereka yang ingin tampil glamor namun tetap dengan cara yang elegan dan sopan.

Perpaduan warna emas kuning atau rose gold dengan kilauan batu mulia akan tetap terlihat menawan, bahkan ketika kamu mengenakan hijab syar'i yang menutupi dada. Model kalung ini sangat cocok untuk dikenakan pada berbagai acara malam, seperti pesta atau kondangan, terutama jika dipadukan dengan gamis yang mewah.

Asimetris atau Geometris

Kalung dengan panjang yang memiliki desain yang menarik, seperti bentuk hexagon, oval miring, atau rantai yang terputus, mampu memberikan kesan artistik dan modern.

Meski berhijab, kamu tetap bisa tampil fashionable. Desain ini sangat ideal bagi kamu yang ingin memiliki penampilan yang berbeda tanpa perlu menggunakan aksesoris yang berukuran besar.

Meskipun terlihat sederhana, detail geometris pada kalung tersebut memberikan daya tarik yang unik. Gaya ini sangat sesuai untuk dipadukan dengan pakaian berwarna

monokrom atau gaya kasual yang minimalis. Dengan kombinasi yang tepat, penampilanmu akan semakin menawan dan tetap stylish.

Beraksen Motif Etnik

Kalung emas dengan desain panjang yang dihiasi ukiran motif etnik atau budaya Nusantara merupakan pilihan yang menarik bagi perempuan berhijab yang ingin menunjukkan kesan elegan sekaligus mengangkat nilai-nilai budaya. Model kalung ini biasanya memiliki liontin besar yang dirancang agar tetap nyaman saat dipakai. (nei,ist/dya)



Kisruh Berulang (dari Hal 1) ...

Inspetkur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Faisal Syahrul menemukan beberapa temuan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ada sekitar empat temuan sementara selama awal masa pendaftaran.

Keempat temuan tersebut antara lain indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi, pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah, kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan serta keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.

"Kami berharap forum ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," kata Faisal dalam acara Forum Bersama Pengawasan SPMB 2025/2026 di The Sultan Hotel & Residence, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (11/6/2025).

Sementara itu, berdasarkan temuan Ombudsman RI aduan-aduan SPMB masih mirip dengan tahun lalu. Menurut Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais ada beberapa rekomendasi dari Ombudsman untuk SPMB tahun ini.

Temuan kami sementara ini adalah rekomendasi kami tahun lalu untuk memperbaiki juknis (petunjuk teknis) yang dalam penyusunannya harusnya melibatkan kementerian/dinas lain," kata Indraza.

Misalnya pada jalur afirmasi, menurut Indraza ada baiknya dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas sosial. Hingga saat ini, ia melihat ada beberapa kota yang belum mengadakan jalur itu.

"Afirmasi itu bukan hanya untuk anak-anak yang tidak beruntung secara ekonomi tapi anak-anak disabilitas juga harusnya mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya," tuturnya.

Kemudian, rekomendasi lain dari Ombudsman RI adalah terkait pemerataan jumlah sekolah. Ia melihat pemetaan jumlah sekolah dan murid belum maksimal.

"Masih banyak kami temukan daerah yang tidak melakukan pemetaan proyeksi antara daya tampung dengan jumlah sekolah, sebaran sekolah sehingga ketika mereka membagi wilayah zonasi, akhirnya yang terjadi apa? Mengukur jarak padahal idealnya adalah melihat dulu sebaran calon peserta didik, dilihat sekolahnya ada di mana barulah dibagi zona namanya zona bukan 'jarakisasi'," tuturnya.

"Lalu belum adanya pemetaan terhadap keluarga tidak mampu secara ekonomi dan anak-anak

disabilitas, ini yang kadang-kadang kurang," lanjutnya.

Indraza menyebut harusnya ada koordinasi dari pusat dan daerah soal bagaimana mensinkronisasikan payung aturan dari Kemendikdasmen dengan pelaksanaannya di lapangan.

"Tantangan terbesar adalah masih kurangnya jumlah sekolah dan belum merata untuk pendidikan, itulah tantangannya," katanya.

Indraza kemudian meminta dinas pendidikan tiap daerah untuk memperhatikan potensi jual beli kursi. Meski kasusnya baru indikasi, Indraza mengingatkan untuk waspada terhadap potensi tersebut.

"Jual beli bangku di tahun-tahun lalu sampai sekarang kan belum seleksinya belum selesai jadi belum kelihatan ini jual belinya. Namun, kalau mulai ada surat-surat sakti ini sudah mulai banyak, kami mendapatkan laporannya," katanya.

Ia bersama Kemendikdasmen dan pihak lain berkomitmen mengawasi jalannya SPMB 2025. Indraza berharap pelaksanaannya bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

"Kenapa diwasani? Karena ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena ada tantangan yang besar. Ombudsman melakukan pengawasan sudah dimulai sejak pra pelaksanaan, pelaksanaan/tahapan dan pasca," katanya.

Di lapangan, Situs SPMB Provinsi Jawa Barat 2025 tahap 1 jenjang SMA, SMK, dan SLB mengalami kendala pada hari pertama pembukaan pendaftaran Selasa (10/6/2025) kemarin.

Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto mengatakan kendala berupa keterlambatan respons situs itu diakibatkan membeludaknya

pendaftar yang mengakses situs secara bersamaan.

"Tentunya evaluasi dan perbaikan terus kami lakukan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan kenyamanan calon peserta didik," ungkap Purwanto, Rabu (11/6/2025).

Sementara, di Jatim calon murid hingga orang tua ramai antre panjang untuk memperoleh PIN pendaftaran SPMB. Mereka bahkan memadati sekolah tujuan sejak pagi buta.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, hal tersebut terjadi lantaran informasi pengambilan PIN belum tersampaikan secara merata. Ia mengatakan, pengambilan PIN bisa dilakukan di 5 hingga 10 sekolah terdekat.

Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur pun menyiapkan sekitar 7.000 petugas help desk untuk memastikan proses pengajuan PIN berjalan lancar tanpa pembatasan layanan.

Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, mengingatkan calon murid wajib membawa dokumen asli dan salinan, seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili (SKD), Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD), ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), serta rapor semester 1 sampai 5. "SKPD tidak bisa diterbitkan oleh kelurahan, harus dari Dukcapil langsung," bebernya Rabu (11/6/2025).

Polisi Siap Turun Tangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan siap menindaklanjuti dugaan praktik jual beli bangku dalam proses SPMB) 2025 apabila ditemukan bukti. Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Umum (Pidum)

Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Hagnyono.

"Kalau memang nanti apa yang disampaikan oleh masyarakat ada bukti yang kuat, bahwa yang bersangkutan melakukan jual beli kursi, kami akan tindak lanjuti," ujar Hagnyono.

Menurut dia, aparat penegak hukum dapat bertindak jika ada laporan resmi dari masyarakat atau temuan dari penyelidikan internal. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan ataupun temuan yang bisa menjadi dasar penyidikan. "Mungkin belum ada tindakan karena memang belum ada laporan dan belum ada yang real ditemukan, mungkin tertangkap tangan atau laporan dari masyarakat," ujarnya.

Polisi, kata Hagnyono, akan terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan masyarakat mengandung unsur pidana. "Strategi penyelidikan kita banyak. Bisa undercover, bisa interview, dan metode lain," kata dia.

Dia menyebut proses hukum baru bisa dimulai apabila penyelidikan menghasilkan cukup bukti awal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan polisi.

Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran publik terhadap potensi praktik korupsi dalam proses seleksi masuk sekolah negeri seperti jual beli kursi. Sebelumnya, pendaftaran sekolah lewat SPMB 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat sudah diterpa isu jual beli kursi di sekolah negeri. Isu itu disebut telah merebak dari laporan orang tua. Ombudsman Jawa Barat ikut menelisik laporan itu yang mengarah ke tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri. (wid,rls, ant,med,kcm/dya)

Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Pastikan Bisa Masuk Swasta

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan siswa yang tidak tertampung dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto mengatakan pembiayaan skema itu bisa berasal subsidi oleh pemerintah. "Kan sudah diatur sebelumnya. Pada saat menghitung daya tampung, melibatkan sekolah swasta. Di DKI Jakarta (contohnya), itu sudah menghitung sekolah-sekolah swasta, daya tampungnya mereka menyediakan berapa," ujar Gogot.

Gogot menjelaskan mekanisme itu telah menjadi bagian dari perencanaan SPMB sebagai antisipasi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Pemerintah

daerah, kata dia, turut mendaftarkan kapasitas sekolah swasta agar siswa yang tidak lolos seleksi tetap memiliki alternatif pendidikan formal yang layak.

"Begitu masuk, dibiayai, disubsidi oleh pemerintah," kata Gogot.

Kemendikdasmen sebelumnya mengimbau pemerintah daerah memfasilitasi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk dapat masuk ke sekolah swasta yang terakreditasi. Adapun hal ini tertuang dalam kebijakan terbaru Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

"Murid yang tidak tertampung di sekolah negeri difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023

Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada agenda peluncuran kebijakan SPMB yang digelar di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 3 Maret 2025.

Dalam landasan hukum terkait SPMB yakni pada Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, kebijakan tersebut termaktub pada pasal 28 ayat (5). "Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama," bunyi dengan tersebut. (wid,tmo,ist/dya)



DPRD Surabaya Dukung Penertiban Jukir Liar

BAHTIYAR RIFAI: HOTLINE PENGADUAN HARUS ADA



Satpol PP Kota Surabaya menutup lahan parkir toko modern di kawasan Dharmahasuda yang tidak memiliki jukir resmi Selasa (10/6/2025). (ist)

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penertiban juru parkir (jukir) liar di Kota Pahlawan.

Menurutnya, program ini sejalan dengan Tindakan Pemkot ini merupakan kelanjutan dari instruksi sebelumnya yang telah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh tempat usaha. Terutama yang memiliki tulisan 'bebas parkir', untuk menyediakan jukir berompi dari tempat usahanya.

"Saya berharap para pelaku usaha ini dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan Wali Kota Surabaya. Mereka berusaha dan berbisnis di kota ini, sehingga mereka harus mematuhi aturan yang ada," kata Bahtiyar, Rabu (11/6/2025).

Dia juga mendorong Pemkot untuk menyediakan saluran pengaduan yang jelas, seperti hotline atau pusat pengaduan. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah melaporkan pelanggaran yang terjadi.

"Kadang masyarakat bingung harus melapor ke mana. Jika melalui media sosial, tidak semua laporan mendapat respons, terutama jika tidak viral. Harus ada mekanisme khusus untuk menerima laporan dan menindaklanjuti dengan tegas," katanya.

Di sisi lain, politisi dari Fraksi

Gerindra ini menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mengimplementasikan peraturan ini di seluruh wilayah yang menggunakan jasa parkir, tidak hanya di minimarket. "Penting bagi Pemkot untuk menegakkan aturan ini agar Surabaya semakin tertata," ucapnya.

Bahtiyar mengungkapkan banyak pelaku usaha sudah membayar pajak parkir kepada Pemkot Surabaya. Untuk itu, mereka diharapkan dapat menyediakan juru parkir yang sah. Bisa juga dengan memberdayakan karyawan untuk mengawasi parkir di area usaha mereka.

"Jika belum ada juru parkir, bisa melibatkan warga sekitar yang memiliki KTP Surabaya untuk membantu mengawasi parkir. Karena mereka juga punya manfaat atas ketersediaan adanya usaha di situ. Jadi mereka bisa dilibatkan untuk keamanan, khususnya parkir," jelasnya.

Harus Ada Verifikasi Sebelum Ditutup

Terkait penutupan lahan parkir minimarket karena tidak memiliki jukir resmi, Bahtiyar menilai sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru.

"Perlu dilakukan kajian dan verifikasi terlebih dahulu, apakah pelaku usaha ini bisa diperingatkan atau harus diberikan langkah tegas. Jangan sampai langkah tersebut merugikan

pengusaha," tambahnya.

Untuk diketahui, penertiban parkir liar di toko modern dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 pasal 14 secara spesifik mewajibkan setiap pemilik usaha untuk memperkerjakan petugas parkir khusus dalam jumlah memadai, berseragam serta memakai tanda pengenal.

Penataan implementasi izin usaha tempat parkir bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perparkiran. Dengan adanya izin tempat parkir resmi, terdapat standarisasi terkait keamanan serta kualitas pelayanan petugas yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Sementara soal adanya juru parkir kelompok, Bahtiyar meminta Pemkot menjalin komunikasi terlebih dahulu. "Bisa saja ini dilakukan secara individu atau dalam kelompok tertentu yang memiliki pengaruh. Jika terkait kelompok, Pemkot harus dapat berkomunikasi dengan mereka, untuk memastikan penataan parkir berjalan dengan baik," tuturnya.

Tak lupa, Bahtiyar juga mengingatkan agar seluruh instansi terkait, seperti camat, dinas perhubungan (Dishub) dan OPD lainnya dapat bekerja sama. Memastikan penertiban berjalan secara merata di seluruh wilayah Surabaya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI/Polri menggelar apel pagi pemberantasan juru parkir liar (jukir) dan aksi premanisme di Halaman Balai Kota, Selasa (10/6/2025).

Kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan di kawasan Dharmahasuda. Wali Kota Eri Cahyadi memerintahkan jajaran Satpol PP untuk menutup lahan parkir dua toko modern yang kedapatan tidak memiliki jukir resmi dengan memasang Satpol PP line.

Penutupan lahan parkir menjadi

konsekuensi agar tidak terjadi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya, toko diperbolehkan untuk kembali beroperasi jika sudah menyediakan jukir resmi.

Eri juga memastikan akan menindak tegas pihak mana pun, termasuk jika ada keterlibatan RT/RW dalam pengelolaan parkir yang tidak sesuai aturan. Ia akan berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait.

"Yang diingat-ingat ya teman-teman, pajak parkir itu pemerintah kota cuma dapat 10 persen, 90 persennya dikembalikan lagi kepada pemilik usaha. Berarti Pemilik usaha bisa menggerakkan warga setempat untuk berdaya," papar Eri. (adv,ama/dya)



Saya berharap para pelaku usaha ini dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan Wali Kota Surabaya. Mereka berusaha dan berbisnis di kota ini, sehingga mereka harus mematuhi aturan yang ada,"

BAHTIYAR RIFAI
Wakil Ketua DPRD Surabaya

